

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Bagir manan, *Lembaga Kepresidenan*, Pusat Studi Hukum FH UII Kerjasama dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung, FH Unika Parahyangan, 2010.
- C. J. Friedrih, *man and His Government*, McGraw-Hill, New York, 1963.
- C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Moern*, London, Sidgwick and Jackson, 1966
- Dahlan thaib, et al, *teori hukum dan konstitusi*, jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999.
- Dahlan Thaib, et al, *TeoridanHukumKonstitusi*, Jakarta, Grafindo Persada, 2006.
- Hamid A. Attamimi dalam Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Restribusi Daerah*, cetakan pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta, Rajawali Press, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, Pustakan Setia, 2014.
- King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujian*, Yogyakarta, Thafa Media, 2017.
- Kurniatmanto Soetoprawiro, *Konstitusi: Pengertian dan Perkembangan*, Pro justitia, 1987.
- Maria Farida Soeprapto, *ilmu perundang-undang; Dasar-Dasar dan Perkembanganya*, Yogyakarta: kanisius, 1998.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Ygkyakarta, Kanisius, 2010.

- Michael Allen dan Brian Thompson, *Cases and Materials on constitutional and administrative law*, Oxford, Oxford University Press, 2003.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penulisan Hukum, Normatif dan empiris, Pustaka Pelajar, 1010*
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, cetakan pertama, Yogkyakarta, FH UII Press, 2003.
- Ni'matul huda & R Nazriyah, *Teori & pengujian peraturan perundang-undangan*, cetakan pertama, Bandung : Nusa media, 2011.
- Ni'matul Huda, *Perkebangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogkyakarta, FH UII Press, 2014.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogkyakarta, UII Press, 2005
- Rosjidi Ranggawidjaja, *pengantar perundang-undangan*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hokum*, Jakarta, UII press, 1986.
- Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, cetakan ke enam, 2006.
- Sri Sumantri M., *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 Dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1993.
- Sri Sumantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, Desentrasi, Alumni, 1987.
- Walton H. Hamilton, *Constitutionalism, enylopedia of social sciences*, Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson, eds., 1931.
- W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990.
- W.J.S Poerwadarminto, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai pustaka, 1976.

Yahya Ahmad Zein, et. Au, *Legislative Drafting Peraturan Perundang-undangan*, Yogkyakarta, Thafa Media, 2016.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang memorandum MPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tata urut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (sebelum diganti).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## **Internet**

Saldi izra dalam Kementrian Rizet, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, *Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Perundang-Undangan*, <http://www.restek.go.id/?module=news%20news&id=8556>, jum'at 29 April 201, diakses pada tanggal 1 November 2017.

Pernyataan menteri coordinator Bidang politik, Hukum, dan Keamanan, wiranto, <http://www.kompas.com>, Rabu, 12 juli 2017.

Jimly Ashiddie, *Tata Urut Perundang-Undangan dan Problem Peraturan Daerah*, makalah disampaikan dalam rangka lokakarya para Anggota DPRD Se-Indonesia, Jakarta, 22 OKtober 2000.

Lawrence M. Friedman, *the legal sistem: a sosialscience perspektif*, Russeli sage foundation, new York, 197, lihat Ahmad Ali, *Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia*, makalah seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Yogyakarta, 25-27 September, 2004, (<http://ugm.a.id/seminar/reformasi/i-ahmad-ali.php>) M. Shiddiq Al-Jawi, *keharusan menganti sistem hukum sekarang dengan sistem hukum islam*.

## **Jurnal**

Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan*, PERSPEKTIF, Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September, dalam artikel, <http://oaji.net/articles/2017/4674-1495161502p.pdf>, diakses pada, sabtu 11 november 2017.

Nvianti, *Kontroversi Perppu Tentang Perubahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan*, Volume IX, Nomor 14/II/Puslit, Juli 2017. [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-IX-14-II-P3DI- Juli-2017-193.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-14-II-P3DI- Juli-2017-193.pdf)

Hanif Kristianto, Arif w, *Politik Dalam dan Luar Negeri, Membincang Khilafah dan HTI*, Volume 2, Nomor 5, Juli 2017. <https://yendrifernando.files.wordpress.com/2017/07/jurnal-pkda-juli-2017-vol-2.pdf><https://yendrifernando.files.wordpress.com/2017/07/jurnal-pkda-juli-2017-vol-2.pdf>

Catur Wibowo dan Herman. *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah*. *Jurnal Bina Praja*, Volume 7 Nomor 1 edisi Maret 2015:1-10. <https://media.neliti.com/media/publications/52270-ID-urgensi-pengawasan-organisasi-kemasyarak.pdf>

Muhammad Siddiq, *Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)*, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 48, Nomor 1, Juni 2014. <https://repository.ar-raniry.ac.id/935/1/Asy-Syirah-Vol.%2048,%20No.%201,%20Juni%202014.pdf>

J. Ronal Mawuntu, *Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Norma Hukum Indonesia*, Volume XIX, Nomor 5, Oktober-Desember 2011. [http://repo.unsrat.ac.id/216/1/EKSISTENSI\\_PERATURAN\\_PEMERINTAH\\_PENGGANTI\\_UNDANG-UNDANG\\_DALAM\\_SISTEM\\_NORMA\\_HUKUM\\_INSONESIA.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/216/1/EKSISTENSI_PERATURAN_PEMERINTAH_PENGGANTI_UNDANG-UNDANG_DALAM_SISTEM_NORMA_HUKUM_INSONESIA.pdf)

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Membangun Konstusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor 1, November 2012.* <http://www.Mahamahkonstitusi.go.id>
- Ni'matul Huda, *Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010.* <https://media.neliti.com/media/publications/107923-ID-pengujian-perppu-oleh-mahkamah-konstitus.pdf>
- Maruarar Siahaan. *Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010.* <https://media.neliti.com/media/publications/107954-ID-uji-konstitusionalitas-peraturan-perunda.pdf><https://media.neliti.com/media/publications/107954-ID-uji-konstitusionalitas-peraturan-perundang-undangan.pdf>
- Janpatar Simamora, *Multtafsir Pengertian "Ikhwal Kegentngan yang Memaksa" dalam Penerbitan Perppu, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 1, Februari 2010, hlm 1-200.*
- Koalisi Kebebasan Berserikat, *Kajian Penafsiran Awal terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Volume 7, Nomor 1, Juli 2017.*